

BAB 4

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 merupakan penjabaran RPJMD tahun 2011-2016 sebagai pelaksanaan tahun ke 5 (lima) dengan fokus pembangunannya pada perwujudan masyarakat yang rukun dan damai disertai melanjutkan arah kebijakan tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, dimana merupakan tahun transisi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pacitan. Penyusunan prioritas dirumuskan berdasarkan :

- a. Isu strategis hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2014 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2015, masalah dan tantangan pembangunan merujuk pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RKP tahun 2016 serta korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan maupun penciptaan lapangan kerja
 - b. Korelasinya terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2011-2016
 - c. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah
 - d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah
- untuk dijadikan sebagai arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana.

Sedangkan Visi Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016 adalah “Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera”.

Makna dari visi tersebut:

“MASYARAKAT PACITAN” adalah sekelompok orang yang hidup bersama di Kabupaten Pacitan dalam satu komunitas yang teratur.

“SEJAHTERA” adalah tatanan kehidupan masyarakat pacitan yang terpenuhinya kebutuhan dasar meliputi antara lain di tandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, derajat pendidikan, dan daya beli masyarakat, hal tersebut selaras visi RPJMN dan RPJM Provinsi Jawa Timur.

Kinerja pembangunan daerah yang ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor-sektor prioritas, yang secara langsung berdampak bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan dan didedikasikan untuk sebesar-besarnya menjamin terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat, yang hasilnya dapat di

didistribusikan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan secara adil, transparan dan akuntabel.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam rencana jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan prioritas.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2016 yang dikaitkan visi misi adalah sebagai berikut:

Tabel.T-IV.1
Hubungan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik	1. Menciptakan aparaturnya pemerintah yang profesional	1. Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparaturnya secara terencana dan sistematis
		2. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan	2. Tercapainya SPM daerah
2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Mewujudkan perilaku dan lingkungan sehat	3. Terselenggaranya Pelayanan Prima
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)
3.	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	1. Mempermudah akses pendidikan	1. Terwujudnya perilaku hidup sehat
		2. Meningkatkan kualitas pendidikan	2. Terciptanya lingkungan sehat
4.	Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan	1. Meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah	1. Meningkatnya pelayanan kesehatan
			2. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan
5.	Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	1. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan
			2. Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau
6.	Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama	1. Meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, berbudi luhur dan damai	1. Meningkatnya pelayanan pendidikan
			2. Terwujudnya pusat ekonomi unggulan daerah
			2. Ketersediaan pangan daerah
			3. Lembaga UMKM dan koperasi sehat dan berdaya saing
			4. Pemasaran komoditas daerah
			1. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur menuju sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian
			2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar
			1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai
			2. Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat

Tujuan Pembangunan daerah yang tertuang dalam tabel hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menciptakan aparaturnya pemerintah yang profesional

Aparaturnya pemerintah yang profesional adalah aparaturnya yang memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta terbebas dari

kolusi, korupsi dan nepotisme dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran yang akan dicapai dalam mencapai tujuan tersebut adalah:

- *Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis.*
- *Tercapainya SPM daerah.*
- *Meningkatkan Terselenggaranya Pelayanan Prima*

2. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan

Dikandung maksud bahwa, pemerintah daerah pada prioritas pembangunan tahun 2016 ini berupaya untuk melaksanakan fungsinya sebagai pelayan (*publik servant*) kepada masyarakat secara cepat, efisien, transparan dan bertanggungjawab. Dalam eksistensinya, sistem pemerintahan akan berkembang terus menerus sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan serta perubahan dan perkembangan yang ada dalam faktor lingkungan.

Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan, dicapai dengan sasaran:

- *Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik (good governance)*

3. Mewujudkan perilaku dan lingkungan sehat

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap masyarakat yang harus wujudkan secara individual dan juga peran serta pihak eksternal sebagaimana dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan dengan berbagai program kegiatan secara langsung maupun sosialisasi tentang cara meningkatkan hidup yang sehat dan perilaku hidup sehat.

Mewujudkan perilaku dan lingkungan sehat dicapai dengan sasaran adalah:

- *Terwujudnya perilaku hidup sehat*
- *Terwujudnya lingkungan sehat*

4. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Akses masyarakat terhadap prasarana atau infrastruktur kesehatan juga sangat menentukan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan, termasuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengingat bahwa setiap warga berhak memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik. Kualitas pelayanan kesehatan yang baik akan memenuhi harapan, keinginan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat dalam rangka pelayanan kesehatan.

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2016 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah:

- *Meningkatnya pelayanan kesehatan*
- *Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan*

5. Mempermudah akses pendidikan

Tingkat pendidikan dan infrastruktur pendidikan yang tersedia di suatu daerah akan menentukan kualitas SDM di daerah tersebut. Akses pendidikan daerah memainkan peranan sangat penting dan strategis dalam pembangunan, guna mencapai masyarakat yang maju, mandiri dan beradab. Oleh karena itu, pada tahun 2016 pemerintah daerah telah menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan jangka menengah daerah, dengan sasaran adalah:

- *Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan*
- *Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau untuk semua*

6. Meningkatkan kualitas pendidikan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas sumberdaya pendidikan daerah memainkan peranan sangat penting dan strategis dalam pembangunan pendidikan, guna mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan beradab. Oleh karena itu, pada tahun 2016 pemerintah daerah telah menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan jangka menengah daerah, dengan sasaran adalah:

- *Meningkatnya pelayanan pendidikan*

7. Meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat. Dalam upaya tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mengetahui potensi wilayah yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2016 dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dengan optimalisasi potensi wilayah adalah:

- *Terwujudnya Pusat Ekonomi Unggulan Daerah dan Berkembangnya UMKM*

8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar

Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya secara lebih baik, sehingga bisa mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur termasuk pendidikan dan kesehatan dasar yang lebih baik, proses pengurangan kemiskinan yang merupakan pilar utama kebijakan pemerintah daerah saat ini, juga dapat lebih dipercepat. Sebagaimana diketahui, pengertian kemiskinan tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi pangan saja, tetapi juga terkait dengan

tidak terpenuhinya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap fasilitas umum lainnya.

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2016 dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar adalah:

- *Meningkatnya Infrastruktur Menuju Sarana Kesehatan, Pendidikan dan Perekonomian*
- *Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur dasar*

9. Meningkatkan tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, berbudi

luhur dan damai Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antar dan inter umat beragama serta fasilitasi sarana prasarana peribadatan, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan, Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana peribadatan, dan meningkatkan kembali tata kehidupan bergotong royong melalui pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian masyarakat dalam mengembangkan tata kehidupannya dengan sasaran adalah:

- *Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai*
- *Terwujudnya ketahanan sosial masyarakat*

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2016

Prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 didasarkan pada Isu-isu Strategis maupun permasalahan yang dihadapi di tahun rencana berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan maka dalam perencanaan pembangunan tahun 2016 isu tersebut antara lain :

1. **Memantapkan layanan publik**, melalui pelayanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas SDM;
2. **Penguatan daya saing perekonomian**, melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan potensi unggulan daerah dan peningkatan ketahanan pangan didukung infrastruktur yang memadai dengan berbasis masyarakat;
3. **Penuntasan Kesejahteraan Masyarakat**, melalui Program Grindulu Mapan.

Sedangkan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 adalah :

1. Meningkatnya kualitas layanan publik terutama layanan pendidikan, kesehatan dan administrasi;
2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat melalui optimalisasi produksi pertanian dan perikanan;
3. Meningkatnya daya saing perekonomian melalui pemberdayaan UMKM dan pengembangan potensi unggulan daerah;

- 4. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan secara terpadu Grindulu Mapan;
- 5. Meningkatnya infrastruktur, terutama jalan, jembatan, irigasi dan air bersih;

Dari kajian isu dan sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 yang ingin di capai maka tema RKPD Tahun 2016 adalah **“Melanjutkan Penyediaan Layanan Publik yang Berkesinambungan dan Memperkuat Daya Saing Perekonomian Menuju Pacitan Sejahtera”**.

Sedangkan dari tema rencana pembangunan daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 maka prioritas pembangunannya meliputi :

- 1. **Kesehatan dan Pendidikan;**
- 2. **Ketahanan pangan daerah;**
- 3. **Perekonomian;**
- 4. **Kesejahteraan sosial;**
- 5. **Infrastruktur Dasar;**
- 6. **Tata kelola pemerintahan.**

Prioritas pembangunan tahun 2016 dijabarkan dalam program pembangunan daerah, dari jumlah keseluruhan 160 program sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJMD Tahun 2011-2016, sebagai berikut :

Tabel.T-IV.2
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
1	1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN
	2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	
	3. Program Pengembangan Perumahan	
	4. Program Lingkungan Sehat Perumahan	
	5. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	
	6. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	
	7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
	8. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
	9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
	10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
	11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
	12. Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
	13. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	
	14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	
	15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	
	16. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	
	17. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	

NO	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
	18. Program Pendidikan Anak Usia Dini	
	19. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
	20. Program Pendidikan Menengah	
	21. Program Pendidikan Non Formal	
	22. Program Pendidikan Luar Biasa	
	23. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
	24. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	25. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
2	1. Peningkatan ketahanan pangan	KETAHANAN PANGAN DAERAH
	2. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	
	3. Program peningkatan produksi hasil peternakan	
	4. Program pengembangan budidaya perikanan	
	5. Program pengembangan perikanan tangkap	
3	1. Program perencanaan pembangunan ekonomi	PEREKONOMIAN
	2. Program Kelitbangan	
	3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	
	4. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	
	5. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	
	6. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	
	7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
	8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
	9. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	
	10. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	
	11. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	
	12. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
	13. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
	14. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
	15. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	
	16. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
	17. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
	18. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
	19. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
	20. Program Pengembangan Kemitraan	
	21. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
4	1. Program Pengembangan Nilai Budaya	KESEJAHTERAAN SOSIAL
	2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
	3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	
	4. Program peningkatan peran serta kepemudaan	
	5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	
	6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	

NO	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
	7. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Nara Pidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	
	8. Program pengembangan wawasan kebangsaan	
	9. Program pendidikan politik masyarakat	
	10. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	
	11. Program pemeliharaan kentrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	
	12. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	
	13. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	
	14. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
	15. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	
	16. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	17. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	
	18. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	
5	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	INFRASTRUKTUR DASAR
	2. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
	3. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	
	4. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	
	5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	
	6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
	7. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	
	8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	
	9. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	
6	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	TATA KELOLA PEMERINTAHAN
	2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	3. Program Penetapan dan Pengendalian SPM	
	4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
	5. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	
	6. Program Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD)	
	7. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	
	8. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	
	9. Program Penataan Administrasi Kependudukan	
	10. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
	11. Program Keluarga Berencana	
	12. Program pelayanan kontrasepsi	
	13. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
	14. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
	15. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
	16. Program perencanaan pembangunan daerah	
	17. Program Perencanaan tata ruang	
	18. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	
	19. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	
	20. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
	21. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
	22. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	

Adapun indikator dan target masing-masing prioritas program pembangunan daerah tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.T-IV.3
Penjelasan Program Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
1	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	Dinkes
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan desa siaga aktif (%)	84,42	Dinkes
		Program Pengembangan Perumahan	Rumah layak huni (%)	94,00	Dinas CKTRK
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rumah bersanitasi (%)	85,21	Dinas CKTRK
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Permukiman layak huni (%)	97,59	Dinas CKTRK
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	% hutan kota dan pohon peneduh yang terpelihara	100	Kantor LH
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	% Pengolahan sampah	30	Kantor LH
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL		Kantor LH
			- AMDAL	100	
			- UKL-UPL/SPPL	100	
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	% Ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	95	Dinkes
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kunjungan puskesmas/visit rate (%)	70,19	Dinkes
			Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	Dinkes
			Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarkes (RS) di Kab/Kota	100	Dinkes
			% penduduk yang memanfaatkan rumah sakit	9,49	RSUD
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	Dinkes
			Cakupan MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100	Dinkes
		Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	84,21	Dinkes
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular :		Dinkes

NO	PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			a. AFP Rate per 100.000 penduduk <15 tahun	≥ 2	
			b. Penemuan penderita pneumonia balita	54	
			c. Penemuan pasien baru TB BTA +	30	
			d. Penderita DBD yang ditangani	100	
			e. Penemuan penderita diare	30	
			Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	Dinkes
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan kunjungan ibu hamil k-4 (%)	95	Dinkes
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	95	Dinkes
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95	Dinkes
			Cakupan pelayanan nifas	95	Dinkes
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80	Dinkes
			Cakupan kunjungan bayi	95	Dinkes
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan pelayanan anak balita (%)	90	Dinkes
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	22	Dinkes
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	40	Dinkes
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	2,5	Dinkes
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (‰)	0,44	Dinkes
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	55,65	Dinas Pendidikan
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) :		Dinas Pendidikan
			- SD/MI	103,1	
			- SMP/MTs	98,00	
		Program Pendidikan Menengah	APK SMA/SMK/MA/Paket C	70,70	Dinas Pendidikan
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) :		Dinas Pendidikan
			- SD/MI	99,00	
			- SMP/MTs	85,01	
		Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/Paket C	60,00	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf (%)	91,65	Dinas Pendidikan
			Cakupan masyarakat yang terlayani pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan masyarakat	0,456	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan Luar Biasa	Cakupan anak berkebutuhan khusus yang mendapat pelayanan pendidikanb (%)	50	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan Taman Bacaan Masyarakat	108.347	Dinas Pendidikan
		Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya perpustakaan di tingkat kab., kec.,desa/kel. bagi masyarakat	70,10	Kantor Perpus., Arsip dan Dok.

NO	PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			Tersedianya buku koleksi di tingkat kab., kec.,desa/kel. bagi masyarakat	2,25	Kantor Perpus., Arsip dan Dok.
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka kelulusan (%) :		Dinas Pendidikan
			- SD/MI	100	
			- SMP/MTs	99,93	
			Nilai rata-rata ujian nasional (%)		Dinas Pendidikan
			- SD/MI	7,35	
			- SMP/MTs	7,30	
		Program Pendidikan Menengah	Angka kelulusan (%)		Dinas Pendidikan
			- SMA/SMK/MA	99,91	Dinas Pendidikan
			Nilai rata-rata ujian nasional (%)		
			- SMA/SMK/MA	7,30	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang bersertifikasi pendidik (%)		Dinas Pendidikan
			- SD/MI	80,00	
			- SMP/MTs	90,00	
			-SMA/MA/SMK	90,00	
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Sekolah yang memiliki akreditasi minimal B (%) :		Dinas Pendidikan
			- SD	55,19	
			- SMP	90,91	
			- SMA	100	
			- SMK	65,90	
2	KETAHANAN PANGAN DAERAH	Peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita	100	Kantor Ketapang
			Penguatan cadangan pangan	100	Kantor Ketapang
			Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	94,44	Kantor Ketapang
			Stabilitas harga dan pasokan pangan	92,53	Kantor Ketapang
			Skor Pola Pangan Harapan:		Kantor Ketapang
			- PPH Konsumsi	73,96	Kantor Ketapang
			- PPH Ketersediaan	95	
			Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	84	
			Penanganan daerah rawan pangan	84	Kantor Ketapang
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas tanaman pangan per hektar (ku/ha)	90,61	Distanak
			Produktivitas hasil perkebunan (ton/Ha)		Dinas Hutbun
			- Kelapa	1,375	
			- Cengkeh	0,13	
			- Kopi	0,55	
			- Nilam	8,262	
			- Lada	0,127	
			- Kapas	0,106	
			- Kakao	0,216	
		Program peningkatan produksi hasil peternakan:			Distanak
			- daging (kg)	3.247.446	
			- telur (kg)	498.000	
			- susu (ltr)	21.600	
		Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (kolam, Keramba, Minapadi) (Kg)	765.152	Dinas Kelautan dan

NO	PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
					Perikanan
		Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	7.036,88	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	PEREKONOMIA N	Program perencanaan pembangunan ekonomi	% data dan informasi ekonomi yang dihasilkan	100	Bappeda
		Program Kelitbangan	% kelitbangan (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa dan pengoperasian) yang dimanfaatkan	100	Balitbangti k
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Cakupan tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang dipasarkan	52,94	Distanak
			Nilai pemasaran produk unggulan perkebunan (Rp.000.000)		Dinas Hutbun
			- Kelapa	113.505	
			- Cengkeh	167.958	
			- Kopi	9.670	
			- Nilam	2.246	
			- Lada	223	
			- Kapas	106	
			- Kakao	3.404	
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Cakupan produk peternakan unggulan yang dipasarkan	53,85	Distanak
		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pengembangan komoditi hutan kayu dan non kayu		Dinas Hutbun
			- Jati (Ha)	18.543,00	
			- Sengon (Ha)	21.428,02	
			- Gmelina (Ha)	2.146,60	
			- Jabon (Ha)	1.171,70	
			- Lebah Madu (setup)	250	
			- Tanaman bawah tegakan (Ha)	220	
		Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Produksi sektor pertambangan :		Distamben
			- pertambangan (ton)	3.000.000	
			- air tanah (m3)	680.279	
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	676.798	Dinas Budparpora
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	% obyek wisata yang layak jual	46,58	Dinas Budparpora
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Produksi produk hasil olahan perikanan (ton)	151	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Konsumsi ikan (Kg/kap/th)	14,12	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Luas areal pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar (Ha)	129,05	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pertumbuhan Industri (%)	2,5	Dinas Koperindag
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi aktif (%)	90,74	Dinas Koperindag
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan bina UMKM	1,87	Dinas Koperindag
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan UMKM yang mendapat bantuan modal (%)	1,72	Dinas Koperindag
		Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Peningkatan Jumlah Wira Usaha Baru (%)	1,6	Dinas Koperindag

NO	PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	4	BPMPP
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan (unit)	10.663	Dinas Koperindag
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi peluang PM Kabupaten	1	BPMPP
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tersedianya Informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	2	BPMPP
		Program Pengembangan Kemitraan	% kemitraan promosi pariwisata dengan pihak luar/agency	76,58	Dinas Budparpora
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Omset penjualan komoditas unggulan (milyar)	610	Dinas Koperindag
			% pasar daerah dalam kondisi baik	80	DPPKA
4	KESEJAHTERAAN SOSIAL	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan fasilitas seni	70	Dinas Budparpora
			Cakupan gelar seni	100	Dinas Budparpora
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan tempat kesenian	100	Dinas Budparpora
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan kajian seni	100	Dinas Budparpora
			Cakupan SDM kesenian	25	
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	% organisasi kepemudaan yang dibina	100	Dinas Budparpora
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	% jenis olah raga yang berprestasi	60	Dinas Budparpora
			% olah raga yang berkembang di masyarakat	50	Dinas Budparpora
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	% sarana dan prasarana olah raga yang dibangun	70	Dinas Budparpora
		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Nara Pidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Cakupan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang dibina	100	Dinas Sosnakertrans
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	% desa mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	100	Bakesbang pol
		Program pendidikan politik masyarakat	% Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik	100	Bakesbang pol
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	2	SATPOL PP
		Program pemeliharaan kentrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	95%	SATPOL PP
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten	0,93	SATPOL PP
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	% Penanganan penyakit masyarakat (PEKAT)	90	SATPOL PP
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	% PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	Dinas Sosnakertrans

NO	PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			% PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80	Dinas Sosnakertrans
			% penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40	Dinas Sosnakertrans
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	% penyandang cacat yang mendapat pelayanan dan pelatihan ketrampilan	11,40	Dinas Sosnakertrans
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	% tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan		Dinas Sosnakertrans
			- Berbasis Kompetensi	75	
			- Berbasi Masyarakat	60	
			- Kewirausahaan	60	
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	% penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN	90	Dinas Sosnakertrans
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	% Penyediaan sarana prasarana pencegahan dini dan penanggulangan bencana	76,49	BPBD
			Kel./Desa siaga bencana (%)	9,94	BPBD
5	INFRASTRUKTUR DASAR	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	% jalan dan jembatan yang dibangun :		Dinas Bina Marga dan Pengairan
			- jalan	40,00	
			- jembatan	86,00	
		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	% jalan dan jembatan dalam kondisi baik:		Dinas Bina Marga dan Pengairan
			- jalan	54,50	
			- jembatan	92,30	
		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Cakupan panjang jalan dan jembatan yang diinspeksi		Dinas Bina Marga dan Pengairan
			- jalan	100	
			- jembatan	100	
		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	% jalan poros desa dan jembatan perdesaan dalam kondisi baik:		Dinas Bina Marga dan Pengairan
			- jalan poros desa	18,90	
			- jembatan perdesaan	50,70	
			Cakupan layanan infrastruktur perdesaan:		Dinas CKTRK
			- Pembangunan jalan lingkungan (%)	41,59	
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	% prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	82	Dishubkom info
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	% pemenuhan sarana prasarana perhubungan	92	Dishubkom info
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	% Rumah tangga pengguna listrik	73,49	Distamben
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rata-rata kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LPMD)	5,08	Bappemas dan Pemdes
			% Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan	57,59	Bappemas dan Pemdes
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	18,77	Bappemas dan Pemdes
6	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	14,33	BKD & Kantor Diklat

NO	PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
			% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi	3,25	BKD & Kantor Diklat
			% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional	0,51	Kantor Diklat
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	% Dokumen kepegawaian yang diselesaikan	92,39	BKD
		Program Penetapan dan Pengendalian SPM	SPM yang diterapkan	15	Setda
			% SPM yang mencapai target	82,00	Setda
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	% puskesmas bersertifikat ISO	25	Dinkes
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	% Sarana prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik:		RSUD
			- Ambulan/mobil jenazah	75	
			- Ruang rawat inap/rawat jalan/penunjang medis/kantor	68,42	
			- Peralatan pelayanan kesehatan	85,33	
		Program Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Cost recovery (%)	≥ 40	RSUD
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	% karyawan rumah sakit yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	25,00	RSUD
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (menit)	10	Dinas CKTRK
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan (%) :		Dispendukc apil
			- KTP	90,64	
			- Kartu Keluarga	96,50	
			- Akta Kelahiran	83,50	
			- Akta Kematian	55,25	
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	% advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	37	Badan KBPP
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	Badan KBPP
		Program Keluarga Berencana	Peserta KB aktif (%)	80,04	Badan KBPP
			Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun (%)	3,5	Badan KBPP
			Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (%)	65	Badan KBPP
			Cakupan program usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%)	5	Badan KBPP
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB (%)	70	Badan KBPP
			Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) / Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) 1 petugas setiap 2 desa/kel	2	Badan KBPP
			Prosentase petugas PPKBD per desa (%)	100	Badan KBPP
		Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	30	Badan KBPP

NO	PRIORITAS PROGRAM	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
			INDIKATOR	TARGET	
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	% panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80	Dinas Sosnakertrans
			% wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60	Dinas Sosnakertrans
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	% Penyandang Masalah Sosial yang mendapat konseling dan pelayanan rehabilitasi sosial	11,40	Dinas Sosnakertrans
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rata-rata ketepatan waktu pemrosesan izin sesuai standar layanan (%)	100	BPMPP
			Terimplementasikannya SPIPISE	100	BPMPP
		Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan perda/perkada:		Bappeda
			- RPJPD	ada	
			- RTRW	ada	
			- RPJMD	ada	
			- RKPD	ada	
		Program Perencanaan tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	80	Dinas CKTRK
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Ketepatan waktu menyelesaikan LKPJ (hari)	75	Setda
			Ketepatan waktu menyelesaikan LPPD (hari)	75	Setda
			Ketepatan waktu menyelesaikan EKPPD (hari)	75	Setda
			% unit pelayanan yang melaksanakan IKM	75	Setda
			Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	100	Setda
			% pelayanan berstandar internasional (ISO)	100	Setda
			% Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditindak lanjuti	100	Inspektorat
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	% SKPD yang menerapkan e-governmen	100	Setda
			Website milik pemerintah daerah	ada	Setda
			Website DPRD Kab. Pacitan	ada	Set. DPRD
			% data dan laporan terpublikasi	100	DPPKA
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	DPPKA
			% barang daerah yang teregistrasi	100	DPPKA
		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	% sistem dan prosedur pengawasan yang disusun	100	Inspektorat
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	% Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100	Inspektorat